

Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Negara Harus Ditingkatkan

JAKARTA, ID – Belanja negara pada semester II-2023 diharapkan semakin meningkat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi belanja negara sampai dengan akhir Juni 2023 mencapai Rp. 1.255,7 triliun atau 41% dari target belanja dalam APBN 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun.

Oleh **Arnoldus Kristianus**

Realisasi belanja negara terbagi dalam belanja pemerintah pusat sebesar Rp 891,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 364,1 triliun.

“Kita harapkan pemerintah bisa melakukan percepatan spending agar memberikan efek ungkit lebih awal bagi perekonomian nasional, namun harus disertai dengan prinsip tata kelola penggunaan keuangan negara dengan baik,” ucap Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah dalam rapat kerja dengan pemerintah pada Senin (10/7/2023).

Said mengungkapkan bahwa secara kualitatif belanja negara sangat penting dalam menopang dan menjaga kesejahteraan rakyat. Dia mengatakan ada dimensi lain yang secara kualitatif berperan besar pada ukuran kesejahteraan, yakni tentang kualitas hidup rakyat yang terkait; tingkat pendidikan, kesehatan, kelayakan tempat tinggal, kualitas lingkungan hidup, jaminan keamanan, ruang ekspresi penyampaian hak, dan lain lain.

“Belanja negara dan kewenangan pemerintah menjadi instrumen sangat menentukan pencapaian kualitas hidup rakyat di atas,” kata dia.

Kemenkeu telah membuat prognosis untuk realisasi belanja selama tahun 2023 yang diperkirakan dapat mencapai Rp 3.123,6 triliun. Angka ini terbagi dalam realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.298,2 triliun dan transfer ke daerah Rp 825,4 triliun. Angka ini di atas pagu belanja tahun 2023 yang sebesar Rp 3.061,2 triliun.

“Jadi untuk belanja pemerintah pusat dan untuk TKD, kami perkirakan realisasinya semua di atas 100% atau di atas pagu,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatan yang sama.

Kesiapan K/L

Sri Mulyani mengatakan percepatan belanja pemerintah pusat terjadi karena adanya kesiapan kementerian/lembaga (K/L) dalam melanjutkan/ menyelesaikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan pada semester II-2023 antara lain belanja infrastruktur, pemilu, IKN, dan berbagai bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.

“Kami memperkirakan belanja pemerintah pusat akan terealisasi pada Rp 2.298,2 triliun atau tetap tumbuh 0,8%. Ini lebih tinggi sedikit dari pagu anggaran tahun 2023. Ini karena banyak K/L yang mengakselerasi belanja di semester II, terutama untuk infrastruktur, IKN, pemilu, dan menjaga bansos tetap terjaga seperti perintah Presiden,” tutur Sri Mulyani.

Guna meningkatkan belanja pemerintah pusat, Kemenkeu mempercepat pinjaman dan/ atau hibah luar negeri (PHLN). Pemerintah juga melakukan penyaluran subsidi dan kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat dan untuk pembayaran kewajiban pemerintah atas penugasan penyediaan pasokan BBM dan listrik dalam negeri yang terjangkau bagi masyarakat.

“Tahun ini kami sudah menambahkan bansos untuk tiga bulan dalam bentuk beras dan ini yang menyebabkan masya-

“ Kami memperkirakan belanja pemerintah pusat akan terealisasi pada Rp 2.298,2 triliun atau tetap tumbuh 0,8%. Ini lebih tinggi sedikit dari pagu anggaran tahun 2023.

Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan

rakat cukup terjaga. Bahkan, saat menjelang Lebaran kita memberikan telur dan ayam. Ini menstabilkan harga telur dan ayam yang sempat mengalami penurunan jelang Lebaran,” tutur dia.

Realisasi transfer ke daerah diperkirakan mencapai Rp 825,4 triliun pada akhir tahun 2023. Angka ini lebih tinggi dari pagu yang sebesar Rp 814,7 triliun. Hal ini berdasarkan realisasi dana bagi hasil (DBH) diperkirakan melebihi pagu, memperhitungkan penyelesaian kurang bayar DBH. Sedangkan dana alokasi dana alokasi umum (DAU) dipengaruhi oleh adanya perubahan pengaturan penyaluran DAU yang telah memperhatikan kinerja penyerapan DAU. Sementara itu, penyaluran dana alokasi khusus (DAK) yang dipengaruhi oleh kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran.

“Untuk transfer ke daerah kita perkirakan mencapai Rp 825,4 triliun atau tumbuh 1,1% dari tahun lalu. Dan juga ini di atas pagu anggaran tahun ini,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, dengan realisasi belanja negara yang terjadi pada semester I-2023 maka pemerintah masih memiliki ruang untuk menggenjot belanja negara di sisa akhir tahun 2023. Dalam hal ini diperlukan kemampuan pemerintah baik di level pusat maupun daerah dalam menggenjot belanja negara akan ikut menentukan pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2023. “Saya kira sama seperti tahun sebelumnya relaksasi belanja daerah



Raker Banggar DPR dengan Menkeu dan BI

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) berbingcang dengan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2023). Raker tersebut membahas penyampaian pokok-pokok laporan realisasi semester I dan prognosis semester II APBN tahun anggaran 2023 serta pembentukan panitia perumusan kesimpulan.

Antara

Perkembangan APBN 2023 (Semester I-2023, dalam Rp triliun)

Uraian	APBN	Realisasi s.d 30 Juni	% thd APBN	Growth (%)
A. PENDAPATAN NEGARA	2.463,0	1.407,9	57,2	5,4
a.l. I. Penerimaan Perpajakan	2.021,2	1.105,6	54,7	5,4
1. Penerimaan Pajak	1.718,0	970,2	56,5	9,9
2. Kepabeanan & Cukai	303,2	135,4	44,7	(18,8)
II. PNPB	441,4	302,1	68,5	5,5
B. BELANJA NEGARA	3.061,2	1.255,7	41,0	0,9
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.246,5	891,6	39,7	1,6
1. Belanja K/L	1.000,8	417,2	41,7	5,9
2. Belanja Non K/L	1.245,6	474,4	38,1	(1,9)
II. Transfer ke Daerah	814,7	364,1	44,7	(1,0)
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(156,8)	368,2	(234,9)	32,0
D. SURPLUS/(DEFISIT)	(598,2)	152,3	(25,5)	66,9
% thd PDB	(2,84)	0,71		
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	598,2	135,1	22,6	(14,8)

Sumber: Kemenkeu

akan lebih besar di periode kedua nanti,” ucap Yusuf.

Dia mengatakan, ada beberapa hal yang sifat administratif dan teknis itu sudah berlaku di paruh pertama di tahun ini sehingga di paruh kedua realisasi belanja daerah akan mengalami peningkatan. Organisasi perangkat daerah yang punya tupoksi dalam memastikan belanja daerah.

“Tentu perlu Intens dalam melakukan evaluasi dan sosialisasi terkait realisasi belanja di daerah,” kata Yusuf.

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan kinerja belanja negara belum optimum karena adanya pola musiman. Biasanya pengeluaran pemerintah akan meningkat

pada semester II-2023. “Mungkin kita masih menunggu penyerapan anggaran belanja lebih optimum di semester II,” tutur Riefky.

Riefky menuturkan bahwa masih ada sejumlah poin yang perlu dioptimalkan dalam kinerja belanja negara. Dia mengatakan bahwa saat ini pemerintah sudah memasuki tahun politik oleh karena itu pemerintah harus memastikan belanja negara tetap untuk pos-pos berkualitas.

“Catatan bagi pemerintah adalah ini sudah memasuki tahun politik sehingga perlu dipastikan belanja ini tidak dimasukkan ke kebijakan populis tetapi memang dibutuhkan untuk peningkatan produktivitas dna pembangunan jangka panjang,” kata dia.

JABABEKA & CO.
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK.

Direksi PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (“Rapat”) dengan rincian sebagai berikut :

Hari, tanggal : Jumat, 07 Juli 2023
Waktu : 10.09 – 12.07 WIB
Tempat : President Lounge, lantai dasar Menara Batavia, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220

A. Pimpinan Rapat
Rapat tersebut dipimpin oleh Bapak Setyono Djuandi Darmono selaku Komisaris Utama, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 05 Juli 2023.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Bapak SETYONO DJUANDI DARMONO
- Wakil Komisaris Utama : Bapak DR. H. SUHARTO ALIUS, MH
- merangkap Komisaris Independen : Bapak GAN MICHAEL
- Komisaris merangkap Komisaris Independen : Bapak GAN MICHAEL

Direksi :
- Direktur Utama : Bapak TEDJO BUDIANTO LIMAN
- Wakil Direktur Utama : Bapak TJAHJADI RAHARDJA
- Direktur : Bapak Ir. HYANTO WILHADHI
- Direktur : Bapak SUTEDJA SIDARTA DARMONO

C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat
Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh 9.325.657.060 saham atau 45,4187642% dari 20.532.388.369 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan 292.500.000 saham treasury atau seluruhnya sebanyak 20.824.888.369 saham yang telah dikeluarkan Perseroan;

D. Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau usulan :
Pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan dan atau usulan setiap Mata Acara Rapat yang disampaikan:

Mata Acara	Jumlah Tanggapan/Usulan	Jumlah Penanya
Pertama	Tidak ada	4 Penanya yang secara keseluruhan mengajukan 6 pertanyaan
Kedua	Tidak ada	Tidak ada
Ketiga	Tidak ada	Tidak ada
Keempat	Tidak ada	Tidak ada

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:
Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) juncto Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”); juncto Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu: disetujui sedikitnya lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

F. Mata Acara Rapat, Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama:
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Suara Setuju	Total Suara Setuju
34.232.132 suara atau 0,3670787%	132.001.713 suara atau 1,4154834%	9.159.323.215 suara atau 98,2174379%	9.291.324.928 suara atau 99,6329213%

Hasil Keputusan :
1. Menyetujui untuk menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang meliputi:
a. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
b. Laporan Direksi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan
c. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang memuat Neraca dan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sulanto Fahmi Bambang dan Rekan terantanggal 17 Maret 2023 Nomor: 00013/3.0424/AU.11031620-31/III/2023.

2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Mata Acara Kedua:
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Suara Setuju	Total Suara Setuju
165.254.039 suara atau 1,7720554%	115.113.007 suara atau 1,2343821%	9.045.390.014 suara atau 96,9935625%	9.160.303.021 suara atau 98,2279446%

Hasil Keputusan :
1. Menyetujui dan menyetujui Perseroan tidak menyetujui dana cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UUPT untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikucualikan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga:
Penunjukkan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Suara Setuju	Total Suara Setuju
8.471.037 suara atau 0,0908368%	132.001.713 suara atau 1,4154834%	9.185.084.310 suara atau 98,4936798%	9.317.086.023 suara atau 99,1623213%

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara Keempat:
Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.

Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Suara Setuju	Total Suara Setuju
50 suara atau 0,0000005%	115.133.007 suara atau 1,2345966%	9.210.424.003 suara atau 98,7654029%	9.325.557.010 suara atau 99,999995%

Hasil Keputusan :
Menyetujui untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan jumlah besaran tetap yang sama dengan tahun sebelumnya.

Jakarta, 11 Juli 2023
Direksi Perseroan

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
PERMINTAAN
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO TAHAP I TAHUN 2023
(“Sukuk Ijarah”)

INFORMASI INI MERUPAKAN PEMBERITAHUAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI KORAN HARIAN INVESTOR DAILY PADA TANGGAL 3 JULI 2023.

Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 (“Sukuk Ijarah”), dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Pokok Sukuk Ijarah yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp488.550.000.000,- (empat ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) dengan 2 (dua) seri Sukuk Ijarah sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp462.600.000.000,- (empat ratus enam puluh dua miliar enam ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp46.260.000.000,- (empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.950.000.000,- (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.854.500.000,- (dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2023, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dan Sisa Imbalan Ijarah sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 13 Juli 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 13 Juli 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri B. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat atas Cicilan Imbalan Ijarah.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase Penjamin Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Emisi Sukuk Ijarah	Porsi Penjaminan		
		Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Total (Rp)
1.	PT BNI Sekuritas	100.300.000.000	13.450.000.000	113.750.000.000
2.	PT BRI Danareksa Sekuritas	201.000.000.000	11.000.000.000	212.000.000.000
3.	PT Sucor Sekuritas	161.300.000.000	1.500.000.000	162.800.000.000
TOTAL		462.600.000.000	25.950.000.000	488.550.000.000

Jakarta, 11 Juli 2023

DIREKSI
PT Mora Telematika Indonesia Tbk

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH

WALI AMANAT
PT Bank KB Bukopin Tbk